

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 tentang belanja didefinisikan sebagai jumlah yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau property lain yang di transfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, suatu pengantar. Surabaya : Erlangga
- Dirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan.
- Halim, Abdul. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Kusufi. 2012. *Terori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 2008. Pengertian analisis.
- Keputusan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Kep 44/PB/2007 tentang reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan untuk pelayanan publik.
- Kuncoro. 2013. Pengertian penyerapan anggaran berdasarkan Undang-Undang APBN.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI
- Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 Republik Indonesia.
- Peraturan Direktorat Djendral Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang Pedoman penggunaan akun pendapatan belanja pegawai.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK. 01/2017 tentang tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan.
- Peraturan Menteri Pertahanan No. 40 Tahun 2014 tentang pengertian pandemi covid-19.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang pengakuan dan pengukuran belanja.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tujuan Laporan Realisasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang mamfaat Laporan Realisasi Anggaran.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19.

Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.

Undang-Undang No. 17 Tahun 200 tentang fungsi anggaran berdasarkan keuangan negara sebagai instrument kebijakan ekonomi.

